



Analisis Tingkat Pemahaman Berdemokrasi Mahasiswa USN Kolaka

Muh. Ali^{1*}, Eko Bambang Murdiansyah²

^{1,2} Universitas Sembilan belas November Kolaka, Indonesia

*Corresponding author: muh.ali08061980@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman berdemokrasi mahasiswa Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka serta mengidentifikasi aspek-aspek yang telah dikuasai dan aspek yang masih memerlukan penguatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif (*quantitative descriptive*) dengan melibatkan 117 mahasiswa aktif Program Studi Manajemen sebagai responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur skala Likert yang mencakup enam indikator utama, yaitu konsep dasar demokrasi, Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), persamaan hak dan tanggung jawab (*equality of rights and responsibilities*), toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta musyawarah dan pengambilan keputusan (*deliberation and decision-making*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase skor respons mencapai 97,46% dari skor maksimum teoritis, yang dikategorikan sangat tinggi. Indikator toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan memperoleh skor tertinggi sebesar 100,00%, disusul persamaan hak dan tanggung jawab sebesar 99,00%, sedangkan indikator Demokrasi Pancasila memperoleh skor terendah sebesar 95,23%. Temuan ini mengindikasikan adanya kecenderungan respons afektif yang sangat positif terhadap nilai-nilai demokrasi universal, namun pemahaman konseptual-filosofis mengenai Demokrasi Pancasila masih memerlukan pendalaman. Penguatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di lingkungan kampus perlu difokuskan pada internalisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui metode studi kasus kontekstual dan simulasi deliberasi nyata guna mentransformasikan persepsi normatif menjadi kompetensi kewarganegaraan objektif.

Kata kunci: Demokrasi Pancasila, Mahasiswa, Pemahaman Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

This study aims to analyze the level of democratic understanding among students at Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka and identify aspects that have been well mastered and those requiring further pedagogical reinforcement. The research employed a quantitative descriptive approach involving 117 active Management Study Program students as respondents. Data were gathered through a structured questionnaire on a Likert scale covering six primary indicators: basic concepts of democracy, Pancasila Democracy, freedom of expression, equality of rights and responsibilities, tolerance and respect for differences, and deliberation and collective decision-making. The results demonstrated that the average response score reached 97.46% of the maximum theoretical score, falling into the very high category. The tolerance and respect for differences indicator achieved the highest score of 100.00%, followed by equality of rights and responsibilities at 99.00%, while the Pancasila Democracy indicator recorded the lowest score at 95.23%. These findings indicate a highly positive affective orientation toward universal democratic values; however, conceptual and philosophical comprehension of Pancasila Democracy requires further consolidation. Civic education in higher education must be reinforced by prioritizing the internalization of Pancasila Democracy through contextual case-based methods and authentic deliberation simulations to transform normative perceptions into objective civic competencies.

Keywords: Civic Education, Democratic Understanding, Pancasila Democracy, University Students.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (*popular sovereignty*) serta berlandaskan pada supremasi hukum (*constitutional democracy*) (Djumadin,

History:

Received : 25 Agustus 2026

Revised : 12 September 2026

Accepted : 23 September 2026

Published : 12 Oktober 2026

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



2021). Dalam dinamika kontemporer, praksis demokrasi tidak sekadar dimaknai secara sempit sebagai mekanisme elektoral prosedural dalam pemilihan umum, melainkan mencakup substansi penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi (*freedom of speech*), kesetaraan kedudukan warga negara di muka hukum (*equality before the law*), transparansi kekuasaan, serta pelebagaan musyawarah dalam merumuskan kebijakan publik (Azis, 2021). Memasuki era disrupsi informasi dan transformasi digital, tantangan demokrasi semakin kompleks akibat menguatnya fenomena polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, serta mengikisnya komitmen terhadap etika berkeadaban dalam ruang publik. Oleh sebab itu, penguasaan literasi demokrasi menjadi modalitas krusial bagi warga negara, khususnya generasi muda terdidik, agar mampu berpartisipasi secara rasional, kritis, dan beretika dalam mengawal keberlanjutan tatanan demokrasi bangsa (Sukadi *et al.*, 2021).

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, demokrasi memiliki watak khas yang berakar kuat pada nilai-nilai filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Chotimah, 2022). Demokrasi Pancasila menegaskan model demokrasi deliberatif yang mengintegrasikan nilai religiusitas, kemanusiaan yang adil dan beradab, integritas persatuan bangsa, hikmat kebijaksanaan permusyawaratan, serta terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Salsabila, 2024). Berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung mengagungkan kebebasan individu tanpa batas maupun demokrasi sosial yang menitikberatkan dominasi kolektivisme negara, Demokrasi Pancasila menempatkan keseimbangan harmonis antara hak-hak individual dan kewajiban moral-sosial terhadap komunitas (Mahendra *et al.*, 2021). Mekanisme musyawarah untuk mufakat diposisikan sebagai instrumen luhur pengambilan keputusan bersama guna mencegah tirani mayoritas (*tyranny of the majority*) maupun dominasi minoritas, sehingga setiap konsensus yang dicapai senantiasa dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konstitusi negara (Yasa *et al.*, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) di perguruan tinggi memegang mandat strategis dalam mentransformasikan konsepsi demokrasi teoritis ke dalam pembentukan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*) mahasiswa (Sukmayadi, 2025). Secara epistemologis, pembinaan warga negara yang demokratis menuntut integrasi utuh tiga pilar kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*), yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) (Fahmi, 2021). Pembelajaran kewarganegaraan tidak boleh tereduksi menjadi sekadar hafalan doktrinal atau pemahaman normatif mengenai pasal-pasal konstitusi, melainkan harus diarahkan untuk melatih nalar kritis mahasiswa dalam menganalisis isu-isu publik, membekali integritas antikorupsi, serta menumbuhkan kepekaan sosial terhadap ketidakadilan (Aksinudin, 2022). Penguatan literasi kewarganegaraan ini esensial guna memastikan bahwa pemahaman demokrasi bertransformasi menjadi kesadaran kritis yang mampu mengarahkan perilaku politik warga negara secara bertanggung jawab (Ginting, 2025).

Mahasiswa menempati kedudukan yang sangat strategis sebagai kelompok intelektual muda yang kerap diidentifikasi sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan penjaga nilai-nilai demokrasi (*iron stock*) (Maulana, 2022). Lingkungan perguruan tinggi secara alamiah bertindak sebagai miniatur negara dan laboratorium kewarganegaraan (*citizenship laboratory*) yang menyediakan ruang artikulasi gagasan melalui organisasi kemahasiswaan, pemilihan umum raya mahasiswa (*pemilwa*), forum advokasi, serta mimbar akademik (Sadeli, 2025). Kendati demikian, tingginya intensitas aktivitas kemahasiswaan tidak secara otomatis mencerminkan kedalaman pemahaman berdemokrasi yang komprehensif (Yusuf, 2023). Sering kali teramati paradoks di kalangan mahasiswa, di mana antusiasme dalam menuntut kebebasan berpendapat di ruang digital tidak diimbangi dengan kedewasaan dalam menyaring ujaran kebencian (*hate speech*), membedakan kritik substantif dari fitnah personal, atau

kesediaan menghargai kemajemukan pandangan ketika musyawarah berlangsung (Putri, 2026).

Urgensi pemetaan pemahaman berdemokrasi menjadi semakin relevan jika dikaji pada konteks perguruan tinggi negeri di kawasan berkembang, seperti di Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa USN Kolaka memiliki latar belakang sosiokultural yang heterogen dan berhadapan langsung dengan tantangan pembangunan daerah serta dinamika politik lokal. Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai profil demokrasi mahasiswa, pengukuran tidak dapat dibatasi pada satu aspek saja, melainkan harus dibedah melalui enam indikator pokok yang terukur secara ilmiah (Azis, 2021). Keenam dimensi tersebut mencakup konsep dasar demokrasi, Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat, persamaan hak dan tanggung jawab, toleransi perbedaan, serta musyawarah mufakat. Pemetaan ini sangat dibutuhkan untuk melihat apakah tingginya afirmasi sikap yang tercermin dalam kuesioner sejalan dengan pemahaman konseptual yang kokoh atau masih berada pada tataran respons normatif yang rentan bias penerimaan sosial (*social desirability bias*).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif (*quantitative descriptive*) untuk menginvestigasi dan mendeskripsikan secara objektif profil tingkat pemahaman berdemokrasi mahasiswa (Sugiyono, 2021). Pendekatan ini memungkinkan pemetaan data numerik secara sistematis guna mengungkap fakta empiris di lapangan (Waruwu, 2024). Pengukuran difokuskan pada enam pilar dimensi demokrasi yang mencakup pemahaman konsep dasar demokrasi, Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), persamaan hak dan tanggung jawab warga negara (*equality of rights and responsibilities*), toleransi terhadap kemajemukan, serta mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan bersama (*deliberation and decision-making*).

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur pemahaman nilai-nilai demokrasi yang didistribusikan kepada responden mahasiswa di Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert yang memuat butir-butir pernyataan positif (*favorable*) dan negatif (*unfavorable*) untuk mengukur respons pemahaman dan afirmasi sikap demokratis mahasiswa. Setiap butir pernyataan direspons melalui lima opsi pilihan (Sangat Setuju, Setuju, Netral/Kurang Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju) yang ditransformasikan ke dalam skor persentase ketercapaian terhadap skor maksimum teoritis.

Instrumen penelitian disusun melalui tahapan operasionalisasi indikator, perumusan kisi-kisi instrumen, telaah validitas isi (*content validity*) oleh ahli Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta pengujian kualitas butir soal dan estimasi reliabilitas sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama.

2.2 Sumber Data dan Sampel Penelitian

Sumber data primer adalah mahasiswa aktif USN Kolaka Program Studi Manajemen yang menjadi responden penelitian. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterwakilan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sehingga diperoleh sampel representatif sebanyak 117 orang mahasiswa.

Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, serta evaluasi hasil belajar (Paramita et al., 2021). Kajian

literatur sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teoretis penyusunan indikator instrumen dan mendukung triangulasi interpretasi hasil penelitian (Adlini *et al.*, 2022).

2.3 Indikator Pengukuran Pemahaman Demokrasi

Pemahaman berdemokrasi diukur melalui enam indikator berikut.

No.	Indikator	Aspek yang diukur
1	Konsep dasar demokrasi	Pengertian, prinsip, dan tujuan demokrasi
2	Demokrasi Pancasila	Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan demokratis
3	Kebebasan berpendapat	Hak menyampaikan aspirasi dan batas tanggung jawabnya
4	Persamaan hak dan tanggung jawab	Kesetaraan warga negara serta kewajiban menghormati hak orang lain
5	Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan	Pemahaman terhadap keberagaman pendapat dan kepentingan
6	Musyawarah dan pengambilan keputusan	Prosedur musyawarah, pengambilan keputusan bersama, dan penghormatan terhadap hasil keputusan

Tabel 1. Indikator Pemahaman Demokrasi

Setiap indikator diukur menggunakan beberapa butir soal yang relevan. Skor setiap indikator dihitung secara terpisah agar penelitian dapat mengidentifikasi aspek demokrasi yang paling dikuasai maupun yang masih memerlukan penguatan.

3.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. Tahap pertama adalah memeriksa kelengkapan jawaban dan melakukan tabulasi skor kuesioner. Tahap kedua adalah menghitung persentase capaian skor setiap indikator terhadap skor maksimum teoritis, dilanjutkan dengan menghitung rata-rata kumulatif seluruh indikator. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel persentase dan diagram visual. Kategori tingkat pemahaman ditetapkan berdasarkan interval kriteria baku untuk menggambarkan profil pemahaman berdemokrasi mahasiswa serta mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang memerlukan penguatan kurikuler.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis tingkat pemahaman berdemokrasi mahasiswa Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka dikembangkan melalui enam indikator utama, yaitu: 1) konsep dasar demokrasi; 2) Demokrasi Pancasila; 3) kebebasan berpendapat; 4) persamaan hak dan tanggung jawab; 5) toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan; serta 6) musyawarah dan pengambilan keputusan. Keenam indikator tersebut digunakan untuk memotret pemahaman dan afirmasi mahasiswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi serta penerapannya dalam dinamika kehidupan akademik dan sosial.

Berdasarkan analisis hasil kuesioner terhadap 117 mahasiswa responden, sebaran jawaban didominasi oleh kategori Sangat Setuju (SS) dan Setuju (S) pada seluruh indikator yang diuji. Ringkasan persentase ketercapaian skor untuk masing-masing indikator disajikan pada Tabel 2.

No.	Indikator penelitian	Skor (%)
1	Konsep dasar demokrasi	96,58
2	Demokrasi Pancasila	95,23
3	Kebebasan berpendapat	96,37
4	Persamaan hak dan tanggung jawab	99
5	Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan	100
6	Musyawarah dan pengambilan keputusan	97,58
	Rata-rata enam indikator	97,46

Tabel 2. Skor Persentase Indikator Penelitian

a. Konsep dasar demokrasi

Indikator konsep dasar demokrasi memperoleh skor sebesar 96,58%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai esensi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat (*popular sovereignty*), prinsip partisipasi warga negara, kesetaraan hak, serta tujuan fundamental demokrasi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Meskipun demikian, penguasaan konseptual ini masih perlu diuji konsistensinya melalui studi kasus nyata pemecahan masalah publik.

b. Demokrasi Pancasila

Indikator Demokrasi Pancasila mencatat skor sebesar 95,23%, yang merupakan skor terendah di antara keenam indikator penelitian. Walaupun skor ini secara absolut masih tergolong dalam kategori sangat tinggi, posisi relatifnya sebagai capaian terendah mengindikasikan bahwa pemahaman mendalam mengenai sintesis nilai-nilai Pancasila, keutamaan musyawarah mufakat di atas pemungutan suara (*voting*), serta keseimbangan hak dan kewajiban asasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Aspek ini menjadi titik fokus strategis yang memerlukan penguatan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

c. Kebebasan berpendapat

Indikator kebebasan berpendapat memperoleh skor sebesar 96,37%. Hasil kuesioner memperlihatkan komitmen positif mahasiswa terhadap hak asasi menyampaikan aspirasi secara bebas dan kritis (*freedom of speech*). Kendati demikian, aspek yang perlu terus diasah adalah kesadaran akan tanggung jawab etis dan konstitusional (*responsible freedom*), terutama kemampuan mahasiswa dalam membedakan kritik konstruktif dari ujaran kebencian (*hate speech*) atau penyebaran disinformasi di media sosial.

d. Persamaan hak dan tanggung jawab

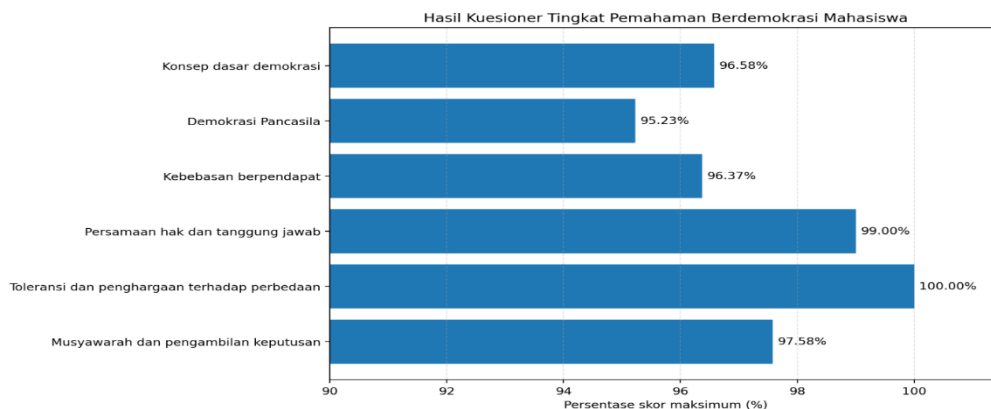
Indikator persamaan hak dan tanggung jawab mencapai skor sebesar 99,00%. Hasil ini membuktikan tingginya kesadaran responden terhadap prinsip kesetaraan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak berpartisipasi secara setara dalam dinamika organisasi kemahasiswaan, serta pentingnya menjalankan hak dengan senantiasa menghormati hak asasi orang lain.

e. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan

Indikator toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan memperoleh skor sempurna sebesar 100,00%. Seluruh respons mahasiswa pada indikator ini berada pada kategori Sangat Setuju, memperlihatkan komitmen moral yang sangat kuat terhadap kewajaran perbedaan pendapat serta penghargaan tinggi atas kemajemukan latar belakang suku, agama, budaya, dan afiliasi politik (*multicultural tolerance*). Namun, skor maksimal pada kuesioner *self-report* ini tetap perlu dikonfirmasi dalam perilaku nyata saat menghadapi situasi konflik kepentingan.

f. Musyawarah dan pengambilan keputusan

Indikator musyawarah dan pengambilan keputusan memperoleh skor sebesar 97,58%. Hasil ini mencerminkan penerimaan yang sangat positif terhadap tahapan musyawarah, kesediaan mendengarkan pandangan kelompok minoritas, dan kepatuhan dalam menghormati serta menjalankan hasil keputusan bersama demi kemaslahatan kolektif.



Gambar 1. Grafik Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman Berdemokrasi Mahasiswa

Pembahasan

Secara kumulatif, rata-rata skor pemahaman berdemokrasi mahasiswa USN Kolaka mencapai 97,46% dari skor maksimum teoritis, yang merefleksikan kategori sangat tinggi. Namun, jika dibedah secara komparatif lintas indikator, tampak adanya disparitas yang menarik antara capaian sempurna pada toleransi (100,00%) dan persamaan hak (99,00%) dibandingkan dengan Demokrasi Pancasila yang menempati skor terendah (95,23%). Fenomena ini dapat dipahami melalui taksonomi kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) (Fahmi, 2021). Indikator toleransi dan persamaan hak merepresentasikan ranah watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang bernuansa afektif-normatif. Generasi muda terdidik sangat responsif mengafirmasi nilai-nilai inklusivitas universal karena terbiasa terpapar wacana kesetaraan di era keterbukaan informasi digital (Azis, 2021). Paparan media sosial mempercepat penerimaan prinsip kesetaraan hak di kalangan generasi Z (Putri, 2026). Sebaliknya, indikator Demokrasi Pancasila menuntut penguasaan pada ranah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang sarat muatan filosofis-ideologis. Mengintegrasikan sila kerakyatan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menuntut pemahaman konseptual yang mendalam (Salsabila, 2024). Penguasaan sintesis sila-sila Pancasila ini tidak cukup dicapai melalui respons afektif spontan semata (Sukadi *et al.*, 2021).

Tingginya skor pada indikator toleransi dan persamaan hak juga harus dicermati secara kritis dalam kaitannya dengan keterbatasan instrumen kuesioner mandiri (*self-report*). Dalam riset perilaku sosial, terdapat potensi bias penerimaan sosial (*social desirability bias*), di mana responden cenderung memilih jawaban yang dianggap paling ideal dan bermartabat secara normatif (Sadeli, 2025). Akses informasi dan pengetahuan politik yang tinggi tidak selalu linier dengan kematangan sikap ketika menghadapi dinamika politik nyata (Yusuf, 2023). Pengakuan

bahwa mahasiswa 'sangat setuju' menghargai perbedaan pendapat belum tentu sepenuhnya teruji ketika mereka dihadapkan pada friksi politik nyata dalam dinamika organisasi kemahasiswaan atau pemilihan umum mahasiswa (*pemilwa*) di kampus (Maulana, 2022). Sebagaimana ditegaskan dalam kajian literasi kewarganegaraan, pemahaman demokrasi yang sejati tidak berhenti pada persetujuan terhadap norma di atas kertas kuesioner, melainkan harus terwujud dalam kemampuan berdeliberasi di ruang publik nyata (Sukmayadi, 2025).

Fakta bahwa Demokrasi Pancasila memperoleh skor terendah memberikan implikasi pedagogis yang sangat konkret bagi rekonstruksi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di USN Kolaka. Pembelajaran kewarganegaraan tidak boleh lagi terjebak dalam metode hafalan monolog yang pasif (Ginting, 2025). Proses pembelajaran di kelas harus mampu membekali mahasiswa dengan integritas moral dan karakter antikorupsi yang kuat (Aksinudin, 2022). Dosen perlu merancang strategi pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*), seperti pembelajaran berbasis studi kasus (*case-based learning*), simulasi musyawarah dan mediasi konflik (*deliberation simulation*), serta proyek kewarganegaraan (*project citizen*) (Chotimah, 2022). Melalui simulasi kasus-kasus dilema publik aktual, mahasiswa dilatih mengaplikasikan partisipasi politik yang konstruktif dalam mengawal masa depan demokrasi (Djumadin, 2021). Pembiasaan ini juga melatih mahasiswa menerapkan asas musyawarah mufakat yang berkeadaban dalam kehidupan global (Mahendra et al., 2021). Dengan demikian, nilai-nilai luhur Pancasila dapat terinternalisasi secara utuh dan membudaya dalam karakter kepribadian mahasiswa (Yasa et al., 2022).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif terhadap 117 mahasiswa Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka, rata-rata skor respons pemahaman berdemokrasi mencapai 97,46% dari skor maksimum teoritis, yang tergolong dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci, indikator toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan mencatat skor tertinggi sebesar 100,00%, disusul persamaan hak dan tanggung jawab sebesar 99,00%, musyawarah dan pengambilan keputusan sebesar 97,58%, konsep dasar demokrasi sebesar 96,58%, kebebasan berpendapat sebesar 96,37%, serta Demokrasi Pancasila yang memperoleh skor terendah sebesar 95,23%.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek yang paling dikuasai dan memperoleh afirmasi afektif terkuat dari mahasiswa adalah dimensi toleransi multikultural, kesetaraan hak di hadapan hukum, dan penghargaan terhadap prosedur musyawarah. Sebaliknya, aspek yang menjadi titik kritis dan mendesak untuk ditingkatkan adalah kedalaman pemahaman filosofis-konseptual mengenai Demokrasi Pancasila serta kesadaran akan batas tanggung jawab etis dalam kebebasan berpendapat. Disparitas ini menegaskan bahwa penerimaan normatif terhadap nilai demokrasi universal perlu diimbangi dengan penguasaan substantif terhadap kekhasan sistem demokrasi deliberatif berbasis Pancasila.

Sebagai implikasi praktis, penguatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu diorientasikan pada model pembelajaran aktif berbasis studi kasus kontekstual (*case method*) dan simulasi musyawarah deliberatif nyata guna mentransformasikan persepsi kuesioner menjadi kompetensi objektif mahasiswa. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena mendasarkan pengukuran pada instrumen kuesioner persepsi mandiri (*self-report*), sehingga penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menerapkan metode kombinasi (*mixed methods*) atau tes penguasaan kognitif objektif guna memverifikasi perilaku demokratis mahasiswa secara faktual dalam kehidupan kampus.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aksinudin, S. W. (2022). Instilling anti-corruption characters in civic education for college students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 53–63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>
- Azis, A. M. (2021). Citizenship education in the Covid-19 era: How to become a digital citizen? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 207–216. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40833>
- Chotimah, U. Y. (2022). Strengthening students' character through TPACK-based learning. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 235–244. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.45430>
- Djumadin, Z. (2021). Student political participation and the future of democracy in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2399–2408. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1438>
- Fahmi, R. S. (2021). The determinant factors in fostering student anti-corruption behavior through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 217–228. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41116>
- Ginting, J. A. (2025). Implementasi strategi sekolah melalui pembelajaran PPKn dalam penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 40–47. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v7i1.6946>
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2021). Membangun karakter berlandaskan Tri Hita Karana dalam perspektif kehidupan global. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 488–498. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34832>
- Maulana, R. R. (2022). Penggalangan civic literacy melalui organisasi kemahasiswaan dan pandangan mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. *DEMOKRASI*, 2(1), 54–76. <https://doi.org/10.36269/dmkr.v1i3.647>
- Paramita, P. D., Rizal, A. A., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif: Teori, praktik, dan panduan analisis data*. Widya Gama Press.
- Putri, K. K. (2026). The role of social media in increasing the political participation of Z Generation in Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v8i1.6201>
- Sadeli, E. H. (2025). Strengthening democracy through campus: The influence of education on student political participation. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v17i1.6762>
- Salsabila, S. A. (2024). Implementasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan kewarganegaraan. *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 64–68. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v6i2.5075>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sukadi, S., & Dewi, N. P. (2021). Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Tri Hita Karana dalam konteks pembelajaran abad ke-21. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 210–222. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41215>
- Sukmayadi, T. A. (2025). Strengthening civic literacy through learning civic education courses at Ahmad Dahlan University. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 498–510. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.86415>

- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 1256–1273. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13024>
- Yasa, I. M., Sukadi, S., & Margi, I. K. (2022). Penerapan nilai-nilai karakter berlandaskan falsafah Tri Hita Karana melalui pembelajaran tematik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(2), 245–258. <https://doi.org/10.38048/jipcb.v9i2.892>
- Yusuf, R. I. (2023). The moderating role of knowledge in the effect of news access on students' political participation in Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(1), 101–114. <https://doi.org/10.26618/jed.v8i1.9644>